

ANALISIS KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I Wayan Sedia

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik

Universitas Mahendradatta

Email: wayansedia11@gmail.com

Abstrak - Kebijakan administrasi pemerintah daerah mempengaruhi pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui alokasi anggaran yang memadai, penerapan regulasi yang mengatur standar pelayanan, serta pengembangan infrastruktur dan fasilitas medis yang lebih baik. Kualitas layanan kesehatan dapat diperbaiki dengan cara meningkatkan fasilitas kesehatan dan profesionalisme tenaga medis sesuai standar yang diperlukan. Kualitas pelayanan yang baik harus terus dipantau melalui pengukuran berkelanjutan untuk mengidentifikasi kendala, sehingga dapat dilakukan perbaikan, dan tindak lanjut sesuai prioritas masalah. Efektivitas kebijakan administrasi pemerintah daerah dalam pengelolaan Rumah Sakit Daerah (RSUD) sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Kata Kunci: *Analisis, Administrasi, Pemerintahan, Rumah Sakit Umum Daerah*

Abstract – *City government administrative policies influence the management of Regional Public Hospitals (RSUD) in improving the quality of health services through adequate budget allocations, the implementation of regulations governing service standards, and the development of better infrastructure and medical facilities. The quality of health services can be improved by improving the standard of health facilities and the professionalism of medical personnel. Good service quality must be continuously monitored through continuous measurement to identify weaknesses and shortcomings, so that follow-up can be carried out according to the priority of existing problems. The effectiveness of city government administrative policies in the management of Regional Hospitals (RSUD) is influenced by several interrelated factors.*

Keywords: *Analisis, Public Administration, Regional General Hospital*

PENDAHULUAN

Administrasi pemerintahan daerah adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Mengelola administrasi daerah pada saat ini sangatlah penting. Ada milyaran rupiah yang dikucurkan dari pemerintah pusat melalui APBN kepada daerah. Jika administrasi pemerintahan daerah yang dilaksanakan tidak tertib, hal itu akan mengakibatkan kacaunya administrasi di pemerintah daerah, seperti pengeloaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Demikian pula anggaran pendapatan, dan belanja rumah sakit. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Rumah sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang memegang peranan penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menguraikan permasalahan administrasi pemerintahan daerah terkait pengelolaan rumah sakit daerah. Penelitian yang bertujuan untuk

menguraikan fenomena sosial secara mendalam yang fokus pada interpretasi, dan perspektif subjek penelitian. Penelitian ini menekankan pada deskripsi, analisis mendalam, dan pemahaman tentang fenomena pelayanan pada pengelolaan rumah sakit umum daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Administrasi Pemerintah Mempengaruhi Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan

Kebijakan administrasi pemerintah kota mempengaruhi pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui alokasi anggaran yang memadai, penerapan regulasi yang mengatur standar pelayanan, serta pengembangan infrastruktur dan fasilitas medis yang lebih baik. Selain itu, kebijakan terkait manajemen sumber daya manusia, pelatihan tenaga medis, dan akreditasi rumah sakit, turut mendorong peningkatan kinerja serta mutu pelayanan. Kebijakan yang mendorong penerapan teknologi informasi dan kerjasama dengan sektor swasta atau lembaga pendidikan juga berperan dalam memperkaya kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat.

Kualitas layanan kesehatan dapat diperbaiki dengan cara meningkatkan standar fasilitas kesehatan dan profesionalisme tenaga medis. Kualitas pelayanan yang baik harus terus dipantau melalui pengukuran berkelanjutan untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut sesuai prioritas masalah

yang ada. Saat ini, terlihat bahwa baik masyarakat yang menggunakan layanan kesehatan dari pemerintah maupun swasta semakin mengharapkan pelayanan yang berkualitas tinggi. Hal ini mencerminkan peningkatan kesadaran dan harapan masyarakat terhadap standar pelayanan kesehatan. Seiring adanya teknologi yang terus berkembang serta akses informasi, masyarakat menjadi lebih kritis dan selektif dalam memilih layanan kesehatan. Selain fasilitas yang memadai, juga profesionalisme dan kompetensi dari tenaga medis yang melayani mereka.

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan utama dalam pembangunan Indonesia tertuju pada bidang kesehatan. Hal ini menegaskan pentingnya pemerintah dalam memprioritaskan kesejahteraan Masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Indonesia, seperti rumah sakit swasta maupun rumah sakit umum daerah. Kebijakan administrasi pemerintah kota dalam pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memenuhi standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan. Namun, dalam kenyataannya, kebijakan tersebut sering kali bergantung pada berbagai faktor, seperti alokasi anggaran, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan fasilitas rumah sakit yang ada.

Beberapa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kota mungkin sudah sejalan dengan kebutuhan masyarakat, seperti peningkatan aksesibilitas layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu atau perbaikan fasilitas rumah

sakit, namun masih ada tantangan besar dalam hal keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga medis terampil, dan infrastruktur yang belum memadai. Oleh karena itu, meski ada upaya yang dilakukan untuk menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, masih dibutuhkan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan agar kebijakan tersebut benar-benar dapat memenuhi standar pelayanan kesehatan yang optimal dan mencangkap seluruh lapisan masyarakat.

3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan Administrasi Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah

Efektivitas kebijakan administrasi pemerintah kota dalam pengelolaan Rumah Sakit Daerah (RSUD) dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut :

- a. **Kepemimpinan yang Efektif**
Kepemimpinan yang kuat dan visioner di tingkat pemerintah kota dan manajemen RSUD sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan dengan baik. Pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang baik akan mampu mengarahkan organisasi menuju tujuan yang diinginkan.
- b. **Kebijakan yang Jelas dan Terarah**
Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah kota harus jelas, terstruktur, dan terarah agar mudah dipahami dan diterapkan oleh semua pihak terkait. Kebijakan yang tidak terkoordinasi dapat menghambat pelaksanaan yang efektif di RSUD.

- c. Sumber Daya Manusia (SDM)
Ketersediaan dan kualitas tenaga kerja, baik di tingkat manajerial maupun tenaga medis dan administrasi, sangat mempengaruhi efektivitas kebijakan. Pelatihan, pengembangan kompetensi, dan kesejahteraan SDM harus diperhatikan agar mereka dapat menjalankan tugas dengan optimal.
 - d. Anggaran dan Pembiayaan
Sumber daya finansial yang cukup dan pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien menjadi faktor penting. Kebijakan pengelolaan keuangan yang baik akan mempengaruhi kualitas layanan rumah sakit, pengadaan fasilitas, dan pemeliharaan sarana prasarana.
 - e. Koordinasi dan Kerjasama Antar Instansi
Efektivitas kebijakan pemerintah kota dalam pengelolaan RSUD juga tergantung pada tingkat koordinasi antara pemerintah kota, manajemen rumah sakit, dan instansi lain yang terlibat, seperti Dinas Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Kerjasama yang baik akan mempercepat implementasi kebijakan dan meminimalkan hambatan administratif.
 - f. Fasilitas dan Infrastruktur
Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai di rumah sakit, seperti ruang perawatan, alat medis, teknologi informasi, dan sistem administrasi yang efisien, dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, kebijakan pengelolaan rumah sakit akan sulit terlaksana.
 - g. Partisipasi Masyarakat
- Dukungan dan partisipasi masyarakat juga penting dalam efektivitas kebijakan. Jika masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau memberikan umpan balik tentang pelayanan kesehatan, maka kebijakan yang dibuat akan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- h. Sistem Informasi dan Teknologi
Penggunaan teknologi informasi yang baik dalam administrasi dan pelayanan rumah sakit sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan transparan akan mempermudah pengelolaan data pasien, anggaran serta pemantauan kinerja rumah sakit.
 - i. Evaluasi dan Pengawasan
Evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan administrasi di rumah sakit dapat memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tanpa evaluasi dan pengawasan yang efektif, penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan dapat terjadi.
 - j. Kondisi Sosial dan Ekonomi
Faktor eksternal, seperti kondisi sosial dan ekonomi masyarakat kota, juga mempengaruhi efektivitas kebijakan. Jika kondisi ekonomi masyarakat rendah, akses terhadap layanan kesehatan mungkin terbatas, yang dapat menurunkan efektivitas kebijakan pengelolaan rumah sakit.

3.3 Tantangan yang Dihadapi Rumah Sakit Umum Daerah Dalam

Penerapan Kebijakan Administrasi Pemerintah Daerah

Tantangan yang dihadapi oleh rumah sakit umum daerah (RSUD) dalam penerapan kebijakan administrasi pemerintah kota sangat beragam dan kompleks. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan anggaran yang menghambat pengadaan fasilitas dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, RSUD sering kali menghadapi kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, yang berimbang pada rendahnya kualitas operasional rumah sakit. Masalah infrastruktur yang belum memadai juga turut serta memperburuk kualitas layanan, sementara birokrasi yang rumit serta ketidaksesuaian antara kebijakan yang diterapkan dengan kebutuhan lokal semakin memperburuk implementasi kebijakan. Rendahnya koordinasi antara pemerintah kota, manajemen rumah sakit, dan masyarakat dalam menyusun kebijakan yang lebih relevan dan implementatif demi dalam meningkatkan layanan kesehatan. Di era digital saat ini, rumah sakit menghadapi tantangan besar dalam administrasi karena perkembangan teknologi yang pesat dan ekspektasi pasien yang semakin tinggi. Administrasi rumah sakit yang tradisional tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan tidak bisa memenuhi harapan pasien yang menginginkan layanan mudah, cepat, efisien, transparan, dan berkualitas.

Ada beberapa tantangan seperti, kebutuhan untuk pengelolaan data medis yang semakin kompleks, regulasi yang terus berubah, dan memberikan layanan yang sesuai dengan standar terkini. Ketidakmampuan untuk beradaptasi

dengan perubahan dapat menghambat efisiensi operasional dan kualitas layanan.

Keharusan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan ekspektasi pasien sangat tinggi. Rumah sakit yang tidak mampu mengikuti perkembangan ini dapat menghadapi risiko kehilangan kepercayaan pasien dan penurunan reputasi. Selain itu, ketidakmampuan untuk memanfaatkan teknologi terbaru, memperlambat layanan, dan menambah beban kerja staf.

Ekspektasi pasien yang semakin tinggi menuntut rumah sakit untuk menyediakan akses yang lebih mudah ke informasi medis, waktu tunggu yang lebih singkat, dan interaksi yang lebih personal. Rumah sakit yang gagal memenuhi harapan ini dapat mengalami penurunan kepuasan dan kehilangan pasien dan berpindah ke penyedia layanan kesehatan yang lebih modern dan responsif.

Oleh karenanya rumah sakit perlu melakukan investasi dalam sumber daya manusia, inovasi teknologi yang lebih adaptif serta responsif. Senada dengan Adhari, L.Z (2021), dalam kepuasan pelanggan, dan pencapaian brand trust dan optimalisasi kinerja karyawan, berikut hal penting dalam mejaga kepuasaan pelanggan sesuai standart ideal rumah sakit pada umumnya;

1. Implementasi Sistem Rekam Medis Elektronik (EHR) yang Canggih : EHR yang terintegrasi memungkinkan rumah sakit untuk mengelola data pasien dengan lebih efisien, memudahkan akses dan pembaruan informasi medis secara real-time. Teknologi ini tidak hanya mempercepat proses administrasi tetapi juga meningkatkan akurasi data dan

- memudahkan koordinasi antar departemen.
2. Adopsi Teknologi Automasi untuk Proses Administrasi : Automasi dalam proses pendaftaran, penjadwalan, dan manajemen antrian dapat mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan efisiensi. Sistem otomatis dapat membantu mengelola alur kerja dengan lebih baik, mengurangi kesalahan manusia, dan memberikan pengalaman yang lebih lancar bagi pasien.
 3. Pengembangan Aplikasi Mobile untuk Interaksi Pasien : Aplikasi mobile dapat memberikan pasien akses mudah ke informasi medis, penjadwalan janji temu, dan umpan balik layanan. Ini membantu memenuhi ekspektasi pasien akan kemudahan dan transparansi, serta memungkinkan rumah sakit untuk berkomunikasi secara efektif dengan pasien.
 4. Integrasi Sistem Analitik untuk Pengambilan Keputusan : Teknologi analitik dapat membantu rumah sakit dalam mengambil keputusan berbasis data. Menganalisis data operasional dan umpan balik pasien, rumah sakit dapat mengidentifikasi dan, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan meningkatkan layanan.
 5. Pelatihan Staf dalam Teknologi Baru : Investasi dalam pelatihan staf untuk menggunakan teknologi terbaru adalah kunci untuk memastikan bahwa teknologi dapat diterapkan secara efektif dan mendukung operasional rumah sakit.

Mengimplementasikan strategi-strategi ini, rumah sakit dapat menghadapi tantangan administrasi dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, dan memenuhi ekspektasi pasien. Inovasi teknologi tidak hanya membantu rumah sakit beradaptasi dengan perubahan tetapi juga memastikan bahwa mereka dapat memberikan layanan yang berkualitas tinggi dan responsif. Menghadapi masa depan administrasi rumah sakit yang penuh dengan tantangan dan peluang, keterampilan dalam teknologi dan manajemen administrasi sangat penting.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Evaluasi Kebijakan Aministrasi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Rumah Sakit Umum Dearah dapat di tarik beberapa kesimpulan :

Kebijakan administrasi yang tepat dan efektif memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Kebijakan yang baik dapat memperkuat pengelolaan sumber daya, seperti anggaran, tenaga medis, dan fasilitas rumah sakit, yang pada gilirannya akan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, keberhasilan

kebijakan tersebut sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan lokal, koordinasi antara pemerintah kota dan manajemen rumah sakit, serta kemampuan pemerintah kota dalam menyediakan dana yang cukup dan sumber daya manusia yang terlatih.

Bahwa efektivitas kebijakan tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi antara lain kepemimpinan yang efektif, ketersediaan anggaran yang memadai, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, infrastruktur yang

memadai, serta sistem informasi yang efisien. Selain itu, koordinasi yang baik antara pemerintah kota, meanajemen Rumah Sakit, dan instansi terkait sangat penting ntuk kelancaran implementasi kebijakan. Evaluasi dan pengawasan yang berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Jika faktor-faktor ini dapat dikelola dengan baik, maka kebijakan administrasi

Bawa RSUD sering kali menghadapi berbagai hambatan yang

berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran, SDM, maupun infrastruktur. Selain itu, adanya ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta prosedur administrasi yang kompleks dan terkadang tumpang tindih, dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Tidak memadainya teknologi pelayanan, dan kurangnya pelatihan bagi staf rumah sakit dan ketidakmampuan dalam menghadapi perubahan regulasi yang cepat juga menjadi tantangan signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alayda, N. F., Aulia, C. M., Ritonga, E. R., & Purba, S. H. (2024). Literature Review: Analisis Dampak Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terhadap Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(7), 2616-2626.
- Hidayat, A., & Yani, S. Z. F. (2022). Peran Administrasi Pembangunan Desa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(7), 7091-7100.
- Literature Review: Analisis Dampak Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Terhadap Akses dan
- Kualitas Pelayanan Kesehatan (Nurul Fifi Alayda, Cindy Monica Aulia, Egril Rehulina Ritonga, Sri Hajijah Purba)
- A, E. R. dkk. (2020). *Teori Administrasi Publik*, cetakan 1. Yayasan Kita Menulis. Athoillah, A. (2017). Dasar-Dasar Manajemen. Edisi ketiga. Pustaka Setia.
- Fathoni, A. (2017). *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta.
- Fitrah, M. dkk. (2017). *Metodologi penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus)*. CV Jejak.
- Jufrizien dkk. (2020). *Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dan Kepemimpinan Transaksional Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Locus Of Control Sebagai Variabel Moderating*.
- Mariane, I. (2017). *Human Relations. Kencana Utama*.
- Moleong, L. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Rosda. Muliawaty, L. dkk. (2017). *Gaya Kepemimpinan Situasional Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di Kota Banjar*.

Northouse, P. G. (2018). Priansa, D. J. (2018). *Manajemen SDM Kepemimpinan: Teori dan Praktik. Indeks.* (Dalam Organisasi Publik dan Bisnis), cetakan ke 6. Alfabeta. Senny, M. H. dkk.